



## PANEN RAYA PADI PROGRAM PEMANFAATAN BAHAN ORGANIK

Unsur Muspika bersama petani menunjukkan padi saat panen raya padi program D'kompuser petani binaan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Desa Dayah Meunara, Aceh Utara, Aceh, Selasa (2/5). Panen raya padi seluas 20 hektare tersebut merupakan binaan program pemanfaatan bahan organik kompos jerami (kompuser) yang mendongkrak hasil gabah kering panen (GKP) petani dari 6,5 ton per hektare menjadi 9,6 ton per hektare.

## BI dan Bank Sentral Laos Perkuat Kerja Sama Bilateral

Nota kesepahaman itu menunjukkan komitmen BI dan BOL untuk memperkuat hubungan kerja sama antara kedua bank sentral melalui kerangka kerja sama yang lebih terstruktur dan sistematis untuk memfasilitasi kolaborasi berbagai inisiatif kerja sama di area kebanksentralan.

**JAKARTA (IM)** - Bank Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Laos atau Bank of The Lao PDR (BOL) menyepakati kerja sama di area kebanksentralan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua bank sentral.

"Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah awal untuk kolaborasi yang lebih solid bagi kedua bank sentral di masa depan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi, dikutip dari *Antara*,

Selasa (2/5). Kesepakatan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur BOL Bounleua Sinxayvoravong pada Selasa (2/5) di Incheon, Korea Selatan di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3.

Nota kesepahaman itu menunjukkan komitmen BI dan BOL untuk memperkuat hubungan kerja sama antara kedua bank sentral melalui kerangka kerja sama yang lebih terstruktur dan sistematis untuk memfasilitasi kolaborasi berbagai inisiatif

kerja sama di area kebanksentralan.

Inisiatif kerja sama di area kebanksentralan dapat meliputi antara lain kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, stabilitas keuangan, serta sistem pembayaran dan settlement. Implementasi kerja sama akan dilaksanakan melalui dialog kebijakan, pertukaran informasi, kerja sama teknis, komunikasi dan konsultasi mengenai pengawasan kerja sama, inovasi bersama, dan pengembangan kapasitas.

Gubernur BI Perry menuturkan menekankan kolaborasi tersebut sejalan dengan semangat Ketekuaan Indo-

nesia di ASEAN 2023 untuk meningkatkan inklusivitas dan konektivitas di antara negara kawasan, sebagaimana tercermin pada nota Kesepahaman tersebut.

Sementara Gubernur Bank Sentral Laos Bounleua Sinxayvoravong menuturkan nota kesepahaman itu tidak hanya menandai tonggak penting dalam meningkatkan kerja sama yang komprehensif antara kedua bank sentral, tetapi juga akan menjadi awal yang baik untuk mendukung perwujudan konektivitas regional ASEAN. • pan

## Pemerintah Atur Ulang Pajak Emas

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah mengatur ulang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas dan jasa terkait penjualan/penyerahan atas emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis.

Selain itu juga jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh Pabrik dan Pedagang Emas Perhiasan serta Pengusaha Emas Batangan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Dwi Astuti menjelaskan pengaturan ulang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan tarif.

"Penurunan tarif dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong semua pelaku usaha industri emas perhiasan masuk dalam sistem sehingga tercipta level playing field di semua lapisan ekosistem industri emas perhiasan," kata Dwi dikutip dari laman Kemenkeu, Selasa (2/5).

Dwi menjelaskan mekanisme baru pengenaan pajak atas emas dan jasa, di antaranya Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pabrik Emas Perhiasan wajib memungut PPN dengan besaran tertentu sebesar 1,1% dari harga jual untuk penyerahan kepada Pabrik Emas Perhiasan lainnya dan Pedagang Emas Perhiasan atau 1,65% dari harga jual untuk penyerahan kepada konsumen akhir, WP yang memiliki SKB pemungutan PPh, Bank Indonesia, atau penjualan melalui pasar fisik emas digital sesuai ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi.

perhiasan, atau 1,65% dari harga jual dalam hal tidak memilikinya.

Khusus penyerahan oleh PKP Pedagang Emas Perhiasan kepada Pabrik Emas Perhiasan, besaran tertentu ditetapkan sebesar 0% dari harga jual.

Tarif tersebut turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK-30/PMK.03/2014, dimana PKP Pabrik dan PKP Pedagang Emas Perhiasan terutang PPN sebesar 10% dikali Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 20% dari harga jual atau penggantian (tarif efektifnya 2% dari harga jual atau penggantian).

Di sisi lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara tidak dikenakan PPN. Sedangkan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara diberikan fasilitas PPN tidak dipungut dalam hal memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PP49/2022.

Pengusaha Emas Batangan juga wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan emas batangan kepada konsumen akhir, WP yang dikenai PPh final cfm. PP-55/2022 (eks PP-23/2018), WP yang memiliki SKB pemungutan PPh, Bank Indonesia, atau penjualan melalui pasar fisik emas digital sesuai ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi.

PPh Pasal 22 tersebut bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

Tarif PPh Pasal 22 ini terhitung turun jika dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam PMK34/PMK.010/2017, dimana sebelumnya, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual. • dro

## Lippo Karawaci Bukukan Laba Bersih Rp1,1 Triliun

**JAKARTA (IM)** - Emiten real estate dan layanan kesehatan PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) mencetak laba bersih sebesar Rp1,1 triliun selama kuartal I-2023, meningkat 54% secara year on year (yoy).

CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady menjelaskan, peningkatan itu didorong oleh fundamental bisnis yang membaik, suku bunga yang lebih rendah, dan pengelolaan utang yang lebih baik. Pendapatan perusahaan juga tercatat naik menjadi Rp3,8 triliun atau tumbuh sebesar 14% YoY.

"Dengan Underlying NPAT meningkat 54% YoY didorong oleh fundamental bisnis yang membaik, suku bunga yang lebih rendah, dan pengelolaan utang yang lebih baik. Kami sangat senang melihat LPKR dan semua unit

bisnis terus bekerja dengan sangat optimal. Kami akan terus menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan kami," kata John dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (2/5).

Laba kotor LPKR juga meningkat 15% YoY menjadi Rp1,6 triliun. Dari sisi EBITDA meningkat 30% YoY menjadi Rp878 miliar.

Pada Kuartal I-2023, pra penjualan LPKR mencapai Rp1,2 triliun atau 24,7% dari target tahun 2023 yang sebesar Rp4,9 triliun, didukung oleh penjualan yang konsisten dari produk rumah tapak. Pra penjualan Kuartal I-2023 terdiri dari Rp873 miliar dari LPKR dan Rp337 miliar dari Lippo Cikarang.

Di segmen layanan kesehatan perusahaan yang dikelola oleh anak usaha LPKR, yaitu PT Siloam International Hospitals

Tbk (Siloam) juga mengalami peningkatan dari kinerja keuangannya. Siloam berhasil mencapai hasil keuangan kuartal pertama tertinggi pada Kuartal I-2023 dengan peningkatan pendapatan sebesar 19% YoY menjadi Rp2,6 triliun.

Kemudian, laba kotor meningkat 29% YoY menjadi Rp1,1 triliun, dan EBITDA meningkat signifikan sebesar 47% YoY menjadi Rp673 miliar, didorong oleh kinerja operasional Siloam yang kuat.

Adapun pada segmen gaya hidup, yang terdiri dari bisnis mal dan hotel, terus menunjukkan pemulihan yang kuat dengan meningkatnya pendapatan sebesar 19% YoY menjadi Rp296 miliar. Laba kotor juga meningkat sebesar 11% YoY menjadi Rp197 miliar. • dot



## PERAGAAN BUSANA KARYA PELAKU UMKM

Model mengikuti peragaan busana Kartini Masa Kini di Teras Malioboro I, Yogyakarta, Selasa (2/5). Peragaan busana koleksi pelaku UMKM di kawasan belanja Teras Malioboro I tersebut untuk memperingati Hari Kartini serta guna mendorong nilai jual produk kreatif pelaku UMKM.



**PULAUINTAN**  
General Contractor

**PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA**  
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

## Teladan Prima Agro Raih Pendapatan Rp955,57 Miliar

**JAKARTA (IM)** - Perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) mencatatkan pendapatan sebesar Rp955,57 miliar pada kuartal I-2023, atau tumbuh 14,3 persen year on year (yoy) dibandingkan sebesar Rp836,36 miliar pada periode yang sama 2022.

Direktur Utama TLDN Wishnu Wardhana menyampaikan capaian positif pada kuartal I-2023 tersebut setara dengan 26,47 persen dari realisasi pendapatan perseroan sepanjang tahun 2022 yang sebesar Rp3,61 triliun.

"Pendapatan pada kuartal I-2023 berasal dari dua sumber, di antaranya dari Crude Palm Oil (CPO) yang mencapai Rp888,61 miliar, serta pendapatan dari Palm Kernel (PK) sebesar Rp66,96 miliar," kata Wishnu dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti dikutip, dari *Antara*, Selasa (2/5).

Dia menjelaskan, peningkatan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya volume penjualan CPO dan PK yang masing-masing sebesar 48,2 persen yoy dan 67,1 persen yoy.

"Peningkatan volume penjualan tersebut, mampu mengkompensasi penurunan harga jual rata-rata CPO dan PK masing-masing sebesar 19,5 persen dan 56,4 persen, sehingga perseroan dapat mempertahankan realisasi kinerja keuangan yang positif,"

kata Wishnu. Lebih lanjut, dia menyampaikan perolehan pendapatan tersebut sejalan dengan kinerja operasional perseroan yang juga tumbuh positif.

Tercatat, dari hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di lahan seluas 60.561 hektare (Ha), perseroan berhasil memproduksi Tandana Buah Segar (TBS) diolah mencapai 302.889 ton pada kuartal I-2023, atau tumbuh 21,6 yoy.

Dari total TBS diolah tersebut, terdapat dua output produk, yaitu produksi CPO sebesar 69.348 ton pada kuartal I-2023, atau tumbuh 22 persen yoy dibandingkan sebesar 56.837 ton pada kuartal I-2022, serta produksi PK sebesar 11.454 ton pada kuartal I-2023, atau tumbuh 25,5 persen yoy dibandingkan sebesar 9.125 ton pada kuartal I-2022.

Dari sisi operasional, ke depan perseroan akan memanfaatkan penggunaan Teladan Productivity Technology Science (TPITS) yang merupakan platform internal perseroan, sebagai implementasi konsep-konsep precision agriculture di seluruh area kebun inti dan plasma perseroan. Selain itu, perseroan juga telah memulai pembangunan pabrik Crude Palm Kernel Oil (CPKO) dan Biogas Power Plant (BPP) yang ditargetkan selesai pada semester II-2023. • hen

## Badan Otorita IKN Bakal Miliki 'BUMN' Sendiri

**JAKARTA (IM)** - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal memiliki perusahaan semacam BUMN. Namanya, Badan Usaha Milik Otorita (BUMO).

Ia menjelaskan, BUMO bakal berhubungan langsung dengan pihak swasta, utamanya para investor yang mau menyuntikkan dananya ke IKN. "Nanti kan ada badan usaha milik otorita (BUMO) itu juga nanti akan selesai, berhubungan dengan investor agar lebih cepat," kata Basuki kepada wartawan, Selasa (2/5).

Basuki mengungkapkan salah satu wewenang yang bakal dimiliki BUMO adalah melakukan penjualan tanah di IKN. Sampai saat ini, hal itu masih disusun prosedur resminya.

"Ya itu buat investor itu, bagaimana cara belinya (tanah di IKN). Karena kan semua kewenangan Otorita, bagaimana cara beli tanah di sana," ujar Basuki.

Masalah mekanisme pembelian tanah ini diakuinya membuat realisasi investasi swasta ke

IKN sampai saat ini belum bisa dilakukan.

Semua pembangunan di IKN, menurutnya hanya berupa pengerjaan proyek pemerintah yang dibiayai APBN.

"Makanya sekarang cuma APBN semua yang dikerjakan. Makanya RDTR-nya disiapkan, tapi kalau ada yang mau bangun RS 5 hektare mau beli tanahnya kan di Otorita," ungkap Basuki.

Sebelumnya Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono sudah pernah lebih dulu mengatakan pihaknya akan memiliki badan usaha yang berhubungan dengan swasta.

Ia mengungkapkan sebagai penyelenggara pemerintahan dan regulator IKN Nusantara, Badan Otorita akan membawahi badan usaha.

Alasan badan usaha itu dipisahkan atau ditempatkan di bawah Badan Otorita untuk aspek kemandirian. "Jadi istilahnya master developer-nya itu nanti ada di badan usaha dan kenapa kita buat itu? Supaya mereka lebih lincah," jelas Bambang beberapa waktu lalu. • pan